ISSN 1978-6506

Terakreditasi LIPI
No. 706/AU/P2MI-LIPI/10/2015

Jurnal

YUDISIAL

Vol. 9 No. 3 Desember 2016 Hal. 237 - 355

[DE] KONSTRUKSI HUKUM

KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

Jurnal isi.indd 1 1/6/2017 11:30:18 AM

Jurnal isi.indd 2 1/6/2017 11:30:18 AM

Jurnal
ISSN 1978-6506
YUDISIAL
Vol. 9 No. 3 Desember 2016 Hal. 237 - 355

Jurnal Yudisial merupakan majalah ilmiah yang memuat hasil kajian/riset atas putusan-putusan pengadilan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak lain yang berkompeten. Jurnal Yudisial terbit berkala empat bulanan di bulan April, Agustus, dan Desember.

Penanggung Jawab: Danang Wijayanto, Ak., M.Si.
Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI

Redaktur:
1. Roejito, S.Sos., M.Si. (Administrasi Negara dan Kebijakan Publik)
2. Dra. Titik A. Winahyu (Komunikasi)

Penyunting:
1. Imran, S.H., M.H. (Hukum Pidana)
2. Dinal Fedrian, S.IP. (Ilmu Pemerintahan)
3. Muhammad Ilham, S.H. (Hukum Administrasi Negara)
4. Ikhsan Azhar, S.H. (Hukum Tata Negara)

Mitra Bestari:
1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. (Filsafat Hukum dan Penalaran Hukum)
2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum. (Metodologi Hukum dan Etika)
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. (Hukum Pidana dan Viktimologi)
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL. (Hukum Pidana, HAM dan Gender)
5. Hermansyah, S.H., M.Hum. (Hukum Ekonomi/Bisnis)
6. Mohamad Nasir, S.H., M.H. (Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam)
7. Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H. (Filsafat Hukum dan Sosiologi Hukum)
8. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Hukum Internasional)

Jurnal isi.indd 3 1/6/2017 11:30:18 AM

	9.	Prof. Dr. H. Yuliandri, S.H., M.H. (Ilmu Perundang-undangan)
	10.	Prof. Dr. Ronald Z. Titahelu, S.H., M.S. (Hukum Agraria dan Hukum Adat)
	11.	Dr. H. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum. (Ilmu Hukum/Ilmu Politik)
	12.	Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. (Hukum Perdata/Hukum Agraria)
Sekretariat:	1.	Agus Susanto, S.Sos., M.Si.
	2.	Yuni Yulianita, S.S.
	3.	Noercholysh, S.H.
	4.	Wirawan Negoro, A.Md.
	5.	Didik Prayitno, A.Md.
	6.	Eka Desmi Hayati, A.Md.
	7.	Emy Nur'aini, S.H.
Desain Grafis dan Fotografer:	1.	Arnis Duwita Purnama, S.Kom.
	2.	Widya Eka Putra, A.Md.

Alamat:

Sekretariat Jurnal Yudisial

Komisi Yudisial Republik Indonesia

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat,Telp. 021-3905876, Fax. 021-3906189

E-mail: jurnal@komisiyudisial.go.id

Website: www.komisiyudisial.go.id

Jurnal isi.indd 4 1/6/2017 11:30:18 AM

PENGANTAR

[DE] KONSTRUKSI HUKUM

Terkadang suatu putusan memunculkan riak luas di dalam masyarakat, termasuk perdebatan mengenai substansi dan nilai-nilai sebuah putusan. Apa yang menjadi menarik umumnya bukan apa yang menjadi keputusan akhir – atau hasil akhir yang dihasilkan putusan, melainkan pertimbangan hakimnya (*motivering)*, yang terkadang merumuskan pertimbangannya tidak membatasi diri hanya pada argumen yuridis belaka. Lebih dari itu, dirujuk pula prinsip-prinsip dasar seperti martabat manusia, dan pertimbangan-pertimbangan pragmatis seperti dampak yang dapat diharapkan dari putusan terhadap masyarakat. Sekalipun justru pertimbangan-pertimbangan demikian memunculkan banyak kritik, juga dapat ditengarai adanya penghargaan bagi kesediaan pengadilan atau hakim untuk bekerja di luar wacana yuridis belaka, atau dengan kata lain, untuk menilai wacana yuridis lebih luas daripada yang lazimnya dilakukan. Alhasil, hasilnya putusan itu *dapat dianggap* meyakinkan, terlepas dari fakta benar atau tidaknya kasus tersebut, atau bahkan kontroversial.

Bagaimana menjelaskan hal di atas? Kondisi apa yang menyebabkan putusan tersebut diterima luas dan dianggap berhasil dan juga direspons negatif oleh masyarakat? Apa pula yang dapat kita pelajari darinya perihal rasionalitas pertimbangan hakim pada umumnya? Jurnal Yudisial edisi kali ini mencoba melihat beragam problematik tentang penafsiran dan pemaknaan dalam putusan. Hakim (hakikatnya) ketika memutus, senantiasa berada dalam ketegangan yang dinamis, yaitu hakim mendekonstruksi sekaligus melakukan konstruksi. Dinamika yang demikian itu, terlihat dalam tema-tema yang ditampilkan penulis, dengan menampilkan putusan hakim yang berbeda-beda pula. Meskipun demikian beberapa substansi artikel memiliki kesamaan satu dengan lainnya yaitu berkisar di antara "**pemaknaan dan penafsiran**."

Pada artikel pertama, makna hak prerogatif presiden kembali dipersoalkan, khususnya dengan perkembangan dewasa ini yang berakhir pada kesimpulan adanya pergeseran makna asal menuju makna yang lebih mengadaptasi kondisi kekinian. Artikel selanjutnya mencoba membedah kinerja Mahkamah Konstitusi di dalam memaknai Undang-Undang Migas, konteks utama masih berkisar di antara keadilan dan juga kemanfaatan bagi masyarakat. Artikel berikutnya menyoroti isu yang umum, yaitu tentang poligami, namun penulisnya mencoba melakukan dekonstruksi, khususnya mengenai pasal-pasal di dalam KUHPidana yang terkait poligami. Problematik penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, masih menjadi topik yang banyak diangkat, namun kali ini penulisnya mencoba melihat substansi yang lebih menohok kepada perbedaan antara *judex factie* dengan *judex yuris*. Artikel berikutnya mencoba melihat bagaimana hakim menjatuhkan pidana bersyarat dalam tindak pidana perbankan, dan terakhir diulas mengenai kekuatan hukum sertipikat hak milik dalam sengketa tanah.

Jurnal isi.indd 5 1/6/2017 11:30:18 AM

Hakikatnya rasionalitas pertimbangan dan kemudian penilaian dalam (putusan) hakim (sebagaimana dijelaskan di atas) adalah hasil akhir dari proses bagaimana hakim menilai pertentangan pendapat dan mempertimbangkan putusan akhirnya. Substansi di dalam masing-masing judul beragam dan berbeda-beda yang substansinya dapat menimbulkan perdebatan yang lebih luas dalam masyarakat tentang hal tertentu. Bagaimana putusan hakim diberi pembenaran (justifikasi); faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pembenaran demikian? Apakah ada temuan-temuan yang diperoleh dalam konteks pemaknaan politis dari putusan hakim, di luar makna-makna mapan (yuridis)? Apa makna putusan demikian dalam negara hukum demokratis? Apakah putusan hakim dapat membahagiakan pencari keadilan atau membahagiakan masyarakatnya? Untuk mengetahuinya kami persilahkan membacanya secara langsung.

Selamat membaca! Terima kasih.

Tertanda
Pemimpin Redaksi Jurnal Yudisial

DAFTAR ISI

Vol. 9 No. 3 Desember 2016 ISSN 1978-6505

PERKEMBANGAN PEMAKNAAN
HAK PREROGATIF PRESIDEN ..... 237 - 258
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015
Mei Susanto
Departemen Hukum Tata Negara,
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

PENAFSIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG MIGAS ..... 259 - 279
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012
Habib Shulton Asnawi
Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIM NU), Lampung

PENAFSIRAN HUKUM DEKONSTRUKSI
UNTUK PELANGGARAN POLIGAMI ..... 281 - 301
Kajian Putusan Nomor 937 K/Pid/2013
Faiq Tobroni
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

PROBLEMATIKA PENERAPAN PASAL 2 DAN 18
UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI ..... 303 - 315
Kajian Putusan Nomor 1283 K/Pid.Sus/2013
Maman Budiman
Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung

PENJATUHAN PIDANA PENJARA BERSYARAT
DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN ..... 317 - 338
Kajian Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014
Ramiyanto
Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti, Palembang

KEKUATAN HUKUM SERTIPIKAT HAK MILIK
DALAM SENGKETA TANAH ..... 339 - 355

Jurnal isi.indd 7 1/6/2017 11:30:19 AM

DAFTAR ISI

Kajian Putusan Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Dps
Fahmi Yanuar Siregar
Universitas Dwijendra, Denpasar

Jurnal isi.indd 8 1/6/2017 11:30:19 AM

JURNAL YUDISIAL

ISSN 1978-6506 Vol. 9 No. 3 Desember 2016

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

UDC 354: 347.993

Susanto M (Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung)

Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/ PUU-XIII/2015

Jurnal Yudisial 2016 9(3), 237 - 258

Dalam literatur hukum tata negara, persoalan mengenai makna hak prerogatif sebagai salah satu kekuasaan presiden, sering kali menimbulkan perbedaan dan perdebatan. Hak prerogatif merupakan kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh seorang presiden tanpa dapat dicampuri oleh lembaga lainnya. Pandangan tersebut seolah-olah menempatkan presiden memiliki kewenangan yang sangat mutlak dan tidak dapat dibatasi sesuai prinsip *checks and balances* dalam ajaran konstitusi yang dianut Indonesia. Putusan Nomor 22/PUU/-XIII/2015 tentang pengujian Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Pertahanan, dan Undang-Undang TNI mengenai persoalan pengisian jabatan Kapolri dan Panglima TNI yang mengharuskan adanya persetujuan DPR layak untuk dijadikan bahasan ulasan. Karena persetujuan DPR tersebut dianggap "mengganggu" hak prerogatif presiden. Perkembangan pemikiran mengenai pemaknaan hak prerogatif presiden dalam Putusan Nomor 22/PUU-XIII/2015, dapat dilihat dalam tiga kelompok besar, yaitu: pandangan ahli, pandangan mayoritas hakim, dan pandangan satu orang hakim yang menyatakan *concurring opinion* (pendapat berbeda). Tulisan ini hendak mengulas pendapat para ahli tersebut, khususnya berkaitan dengan pemaknaan hak prerogatif sesuai dengan fokus tulisan. Beberapa pandangan berkaitan dengan pemaknaan hak prerogatif dalam Putusan Nomor 22/ PUU-XIII/2015 merupakan sumbangsih pemikiran dalam hukum tata negara, untuk kemudian dapat direkonstruksi dan memberikan makna yang lebih esensial dari hak prerogatif.

(Mei Susanto)

Kata kunci: hak prerogatif, kekuasaan presiden, konstitusi.

UDC 347.993 (094.5)

Asnawi HS (Institut Agama Islam Ma'rif NU (IAIM NU), Lampung)

Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Migas

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/ PUU-X/2012

Jurnal Yudisial 2016 9(3), 259 - 279

Pembahasan dalam analisis putusan ini berangkat dari keprihatinan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Undang-Undang Migas) yang telah meruntuhkan kedaulatan negara dan kedaulatan ekonomi bangsa. Undang-Undang Migas tidak memungkinkan negara mengolah minyak mentahnya sendiri di dalam negeri kemudian mengekspornya ke luar negeri. Kenyataan yang terjadi selama ini, Indonesia hanya menjual minyak mentah kemudian diolah di luar negeri. Selanjutnya Indonesia membeli minyak tersebut yang sesungguhnya minyaknya sendiri dengan harga minyak dunia. Pun penjualan dan pembelian dilaksanakan melalui perantara. Sebagai upaya mengembalikan kedaulatan Indonesia di bidang migas, para pemohon mengajukan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara telah mengambil langkah dalam memutuskan perkara tersebut dengan Putusan

Jurnal isi.indd 9 1/6/2017 11:30:19 AM

Nomor 36/PUU-X/2012 tentang pembubaran BP Migas. Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran secara mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang dikaitkan dengan UUD NRI 1945. Penelitian dalam analisis putusan ini dilakukan melalui studi kepustakaan menggunakan metode penafsiran hukum, dengan pendekatan yuridis (normatif) dan analisis kualitatif. Kesimpulannya, dalam beberapa pasal Undang-Undang Migas dinilai bertentangan dengan konstitusi yaitu Pasal 33 UUD NRI 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dinilai sebagai sebuah pilihan bijaksana serta langkah progresif di bidang hukum khususnya perlindungan terhadap hak rakyat Indonesia.

(Habib Shulton Asnawi)

Kata kunci: penafsiran hukum, undang-undang migas, kedaulatan negara.

UDC 392.54

Tobroni F (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta)

Penafsiran Hukum Dekonstruksi untuk Pelanggaran Poligami

Kajian Putusan Nomor 937 K/Pid/2013

Jurnal Yudisial 2016 9(3), 281 - 301

Putusan Nomor 937 K/Pid/2013 menunjukkan bahwa pelanggaran poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam dapat dipidana dengan dihubungkan kepada pemidanaan atas pernikahan terlarang. Analisis ini menitikberatkan pada dua hal yaitu: *pertama*, bagaimana perbedaan pertimbangan hukum antara dua putusan; *kedua*, perbedaan metode penafsiran hukum dari setiap putusan dan implikasinya untuk menghubungkan pemidanaan atas pernikahan terlarang dengan pelanggaran poligami. Putusan Nomor 341/Pid.B/2012/PN.BKN menganggap perkawinan IR dengan H (yang dianggap terlarang) adalah tidak sah, sementara Putusan Nomor 937 K/Pid/2013 menganggap sebaliknya. Metode penafsiran hukum dalam Putusan Nomor 341/Pid.B/2012/PN.BKN adalah *subsumptif*, sehingga menyimpulkan bahwa IR tidak dapat dipidana. Sementara metode penafsiran hukum dalam Putusan Nomor 937 K/Pid/2013 adalah metode dekonstruksi dalam pengertian melakukan intertekstualitas teks hukum (menemukan makna tidak terkatakan). Putusan kasasi menunjukkan bahwa pidana oleh IR atas Pasal 279 ayat (1) KUHP (perkawinan yang telah ada dapat menjadi penghalang perkawinan setelahnya) justru mendapatkan justifikasi dari makna yang tidak terkatakan atau di luar KUHP (suami tidak boleh menikah lagi tanpa adanya izin dari istri yang ada; Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) yang dibuktikan dengan ketiadaan izin istri pertama (SM) bagi IR untuk menikah dengan H.

(Faiq Tobroni)

Kata kunci: poligami, pernikahan terlarang, metode penafsiran.

UDC 343.352 (094.5)

Budiman M (Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Bandung)

Problematika Penerapan Pasal 2 dan 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kajian Putusan Nomor 1283 K/Pid.Sus/2013

Jurnal Yudisial 2016 9(3), 303 - 315

Problematika penerapan pasal dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, jo. Nomor 11/Tipikor/2013/PT.BDG, jo. Nomor 1283 K/Pid.Sus/2013 menyebabkan timbulnya rasa ketidakadilan. Dalam ketiga putusan tersebut terdapat persoalan yang menarik untuk dikaji, terutama majelis kasasi yang mengubah pasal, dari Pasal 3 jo. Pasal 18 menjadi Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berimplikasi terhadap lamanya pemidanaan dan pengembalian kerugian negara. Analisis ini mengkaji tentang penerapan Pasal 2 dan 18 Undang-Undang Pemberantasan

Jurnal isi.indd 10 1/6/2017 11:30:19 AM

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Analisis ini mengulas tentang mengapa hakim tingkat kasasi menjatuhkan putusan menggunakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan apakah penerapan Pasal 18 sudah tepat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Hasil analisis menyimpulkan bahwa dalam pertimbangannya, *judex juris* pada perkara tingkat kasasi telah keliru dalam membuktikan unsur melawan hukum sebagaimana tertera pada Pasal 2 ayat (1), sebab pencantuman unsur melawan hukum pada pasal tersebut mengharuskan pembuktian unsur melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. *Judex juris* dalam perkara tingkat kasasi juga telah keliru dalam penerapan Pasal 18 terutama mengenai besaran uang pengganti dari kerugian negara.

(Maman Budiman)

Kata kunci: *judex juris*, unsur melawan hukum, korupsi.

UDC 343.53

Ramiyanto (Fakultas Hukum, Universitas Sjakhyakirti, Palembang)

Penjatuhan Pidana Penjara Bersyarat dalam Tindak Pidana Perbankan

Kajian Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014

Jurnal Yudisial 2016 9(3), 317 - 338

Di Indonesia, tindak pidana perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di dalam undang-undang tersebut diatur secara tegas mengenai ancaman sanksi berupa pidana bagi pelanggarnya. Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah mengatur ancaman pidana untuk tindak pidana perbankan dengan sistem minimum khusus, yaitu paling sedikit tiga tahun penjara dan denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Majelis hakim dalam Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014 menjatuhkan pidana penjara bersyarat. Putusan tersebut membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang (*judex facti*) Nomor 437/Pid.Sus/2013 yang menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*). Majelis hakim dalam Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014 telah menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman minimum, yaitu selama enam bulan penjara dengan sistem bersyarat. Menurut Pasal 14 ayat (1) KUHP, pidana bersyarat hanya dapat dilakukan apabila majelis hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun. Analisis putusan ini berfokus pada pokok pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014 terkait penjatuhan pidana penjara bersyarat, dilihat dari ketentuan lamanya ancaman pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan berkesimpulan bahwa penjatuhan pidana penjara bersyarat dalam kasus tersebut dapat dibenarkan dengan alasan demi keadilan serta fakta keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku dan keadaan yang melingkupinya.

(Ramiyanto)

Kata kunci: penjatuhan pidana, pidana penjara bersyarat, tindak pidana perbankan.

UDC 349.423

Siregar FY (Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra, Bali)

Kekuatan Hukum Sertipikat Hak Malik dalam Sengketa Tanah

Kajian Putusan Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Dps

Jurnal Yudisial 2016 9(3), 339 - 355

Objek pembahasan dalam kajian putusan ini adalah Putusan Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Dps yang memutus perkara sengketa sertipikat ganda yang mengakibatkan tidak adanya kepastian atas kepemilikan sebidang tanah. Penulisan kajian putusan ini menggunakan metode penelitian eksplanatoris

Jurnal isi.indd 11 1/6/2017 11:30:19 AM

dengan berdasar kepada penilaian atas objek yang pantas untuk diteliti dan memilih kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 25 Agustus 2014 tersebut, setelah dilakukan observasi secara berkala terhadap proses hukum sampai dijatuhkan putusan. Kajian ini menggarisbawahi bahwa salah satu tugas pokok pengadilan adalah untuk menyelesaikan sengketa terhadap perkara yang ditangani dan memberikan manfaat positif terhadap para pihak. Dalam penyelesaian sengketa, majelis hakim harus menjatuhkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan dan harus mempertimbangkan sisi kemanfaatan. Putusan yang dijatuhkan idealnya dapat memberikan manfaat yang positif, bukan malah menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat supaya putusan yang dibuat oleh majelis hakim yang terhormat dapat berwibawa dan bijaksana. Namun Putusan Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Dps telah berdampak buruk terhadap para pihak. Dalam menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pihak ternyata Pengadilan Negeri Denpasar tidak memutus pada pokok permasalahan, akan tetapi malah mengesahkan alasan-alasan terjadinya perbuatan hukum. Sehingga, putusan yang dikeluarkan tidak menyelesaikan permasalahan antara para pihak, akan tetapi mengembalikan perkara kepada keadaan sebelum diajukan ke pengadilan.

(Fahmi Yanuar Siregar)

Kata kunci: sertipikat hak milik, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum.

Jurnal isi.indd 12 1/6/2017 11:30:19 AM

JURNAL YUDISIAL

ISSN 1978-6506 Vol. 9 No. 3 Desember 2016

The Descriptors given are free terms. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.

UDC 354: 347.993

Susanto M (Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung)

The Construal Development of the Prerogative Right of the President

An Analysis of Constitutional Court's Decisions Number 22/PUU-XIII/2015 (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2016 9(3), 237 - 258

In the sphere of constitutional law, the issue of prerogative construal as one of the president's powers, often leads to different opinions and arguments. Prerogative is a distinct power held by the president, which cannot be interfered with by other agencies. The perspective seems to indicate that the president has an absolute authority that cannot be limited by the checks and balances in the principles of constitutional law employed in Indonesian law. The Constitutional Court Decision Number 22/PUU/-XIII/2015 concerning judicial review of the Law on Indonesian National Police, the Law on Indonesian Defense, and Law on Indonesian National Armed Forces on the issue of filling the positions of the Chief of Indonesian National Police and the Commander of the Indonesian National Armed Forces requiring the approval of Parliament became the subject of discussion in this analysis, given the House of Representative's approval is measured an "intervention" to the prerogative of the president. The development of perspective on the construal of the prerogative of the president in the Constitutional Court Decision Number 22/PUU-XIII/2015 is divided into three major groups, i.e. the perspective of the experts, the perspective of the majority of judges, and the perspective of one judge stating a concurring opinion. This analysis proposes to review the opinion of the experts, especially those relating to the construal of the prerogative as the focus of discussion. Several perspectives on the construal of the prerogative in Constitutional Court Decision Number 22/PUU-XIII/2015 are considered as conceptual contributions to the Constitutional Law, which could then be reconstructed to provide more essential construal of the prerogative.

(Mei Susanto)

Keywords: prerogative, powers of the president, constitution.

UDC 347.993 (094.5)

Asnawi HS (Institut Agama Islam Ma'rif NU (IAIM NU), Lampung)

Constitutional Court's Interpretation Regarding Law on Oil and Gas

An Analysis of Constitutional Court's Decision Number 36/PUU-X/2012 (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2016 9(3), 259 - 279

The focus discussion of this analysis arises from the concern of Law Number 22 Year 2001 on Oil and Gas (Oil and Gas Law) which has failed the state sovereignty and the national economy. Oil and Gas Law does not permit the state to cultivate its own crude oil domestically, then export it to overseas. The fact that happened so far is that Indonesia only sells crude oil to be taken up overseas. Furthermore, Indonesia buys the oil, which in fact is its own oil, with the world oil price. Even then, the sales and purchases are effected by intermediaries. As an effort to reduce the sovereignty of Indonesia in the field of oil and gas, the petitioners filed a judicial review of Law Number 22 Year 2001 on Oil and Gas. The Constitutional Court as a state institution take in its stride is to decide the case through the Constitutional Court Decision Number

Jurnal isi.indd 13 1/6/2017 11:30:19 AM

36/PUU-X/2012 on the Dissolution of Executing Agency of Upstream Oil and Gas Industry. The Constitutional Court did an in-depth interpretation of Law Number 22 Year 2001 which is attributed to the 1945 Constitution. The research of this decision is done through library research using legal interpretation method for juridical (normative) and qualitative analysis. In conclusion, several articles of the Oil and Gas Law are considered contradictory to the Constitution, such as Article 33 the 1945 Constitution. The Constitutional Court Decision are appraised as a wise choice as well as progressive measures in the legal field, notably for the protection of the rights of the people of Indonesia.

(Habib Shulton Asnawi)

Keywords: legal interpretation, oil and gas law, state sovereignty.

UDC 392.54

Tobroni F (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta)

Legal Interpretation of Deconstruction in Criminal Offense of Polygamy

An Analysis of Court Decision Number 937 K/Pid/2013 (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2016 9(3), 281 - 301

Decision Number 937 K/Pid/2013 shows that the criminal offense of polygamy which are not in accordance with Law Number 1 of 1974 on Marriage and Presidential Instruction Number 1 of 1991 on the Dissemination of Islamic Law Compilation may be subject to criminal with relation to the offense of illicit marriage. The focus of the discussion in this analysis is tantamount to explaining how two decisions have differences in the legal considerations and different methods of legal interpretation, and its implications related to criminal prosecution for illicit marriage with polygamy offense. Decision Number 341/Pid.B/2012/PN.BKN discusses the marriage of IR to H (which is considered illicit) is unlawful, while Decision Number 937 K /Pid/2013 assumes otherwise. The legal interpretation of Decision Number 341/Pid.B/2012/PN.BKN is subsumption method, which concludes that IR is not subject to criminal. Whereas the rightful interpretation of Decision Number 937 K/Pid/2013 is the method of deconstruction, conducting intertextuality on the legal texts (finding "the unspeakable meaning"). Decision of cassation indicates that the criminal sanction of IR on Article 279 paragraph (1) of the Criminal Code (previous marriage can be a barrier for subsequent marriages), even get justification of "the unspeakable meaning" or apart from the Criminal Code (a husband should not marry again without permission of his wife; Article 9 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage). This is taken into account in the absence of the first wife's permission (SM).

(Faiq Tobroni)

Keywords: polygamy, illicit marriage, legal interpretation.

UDC 343.352 (094.5)

Budiman M (Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Bandung)

Problematics in the Application of Article 2 and 18 of the Law on Corruption Eradication

An Analysis of Court Decison Number 1283 K/Pid. Sus/2013 (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2016 9(3), 303 - 315

The problematic in the application of articles in the Decision Number 54/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, jo. Number 11/Tipikor/2013/PT.BDG, jo. Number 1283 K/Pid.Sus/2013 has made an opening sense of injustice. There are issues interesting to discuss the three decisions, especially those related to the panel of judges in the Court of Final Appeal who made changes to the articles, ie, from Article 3 jo. Article 18 to Article 2 jo. Article 18 of Law Number 31 of 1999 on Corruption Eradication, which has implication in the period of criminal prosecution and indemnification of state. This analysis considers

Jurnal isi.indd 14 1/6/2017 11:30:19 AM

the application of Article 2 and Article 18 of Law Number 31 of 1999 on Corruption Eradication, as amended by Law Number 20 of 2001 on Corruption Eradication. The problems are why the judge of final appeal court in making a decision to apply Article 2 of Law Number 31 of 1999, and whether the application of Article 18 is appropriate. The method used is normative legal research to review and examine the legislation, the decision of courts of first instance, the appellate and cassation. The analysis finds that at the level of cassation, judex juris in its consideration had erred in proving the elements of tort as indicated on Article 2 Paragraph (1). This is due to the inclusion of elements of torts on the aforementioned article requires proof of elements of torts in procedural and substantive law. Judex juris in the case of cassation also had erred in the application of Article 18 of primarily regarding the amount of indemnities of state losses.

(Maman Budiman)

Keywords: judex juris, elements of tort, corruption.

UDC 343.53

Ramiyanto (Fakultas Hukum, Universitas Sjakhyakirti, Palembang)

Conditional Imprisonment Sentencing in Banking Criminal Case

An Analysis of Court Decision Number 1554 K/ Pid.Sus/2014 (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2016 9(3), 317 - 338

Banking Crime in Indonesia is regulated in Law Number 10 of 1998 on the amendment to Law Number 7 of 1992 on Banking. The law expressly set the criminal sanctions for any violation. Article 49 paragraph (2) point b of Law Number 10 of 1998, has been stipulated criminal sanctions for banking crime at a special minimum system, which is imprisonment a minimum for three years and fine for at least five billion rupiahs. In Decision Number 1554 K/Pid.Sus/2014 concerning banking crime, the panel of judges imposes unconditional imprisonment. Judex facti of the District Court of Tanjung Karang in the decision has overturned the Decision Number 437/Pid.Sus/2013 which is a judgment of acquittal (vrijspraak). The panel of judges in Decision Number 1554 K/Pid.Sus/2014 has dropped the sentence to six-month in prison term, which is placed under the minimum penalty of a criminal sentence. According to Article 14 paragraph (1) of the Criminal Code, conditional sentencing can only be compelling if a panel of judges dropped a maximum imprisonment of one year. The analysis focuses on the consideration of the panel of judges in making the Decision Number 1554 K/Pid.Sus/2014 and sentencing conditional imprisonment in accordance to the criminal sanction and sentencing provisions. This analysis employs normative legal research methods and resolves that sentencing conditional imprisonment in this case is allowed for the sake of justice, as well as the facts, the balance between error level of the accused and the circumstances surrounding.

(Ramiyanto)

Keywords: sentencing, conditional imprisonment sentence, banking crime.

UDC 349.423

Siregar FY (Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra, Bali)

The Legitimation of Freehold Title in Agrarian Dispute

An Analysis of Court Decision Number 25/ Pdt.G/2014/PN.Dps (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2016 9(3), 339 - 355

The object of the discussion in this analysis is Court Decision Number 25/Pdt.G/2014/PN.Dps ruling a dispute of double certificates of freehold titles resulting in lack of certainty over the ownership of a plot of land. This analysis uses explanatory research method, which is based on the assessment of the

Jurnal isi.indd 15 1/6/2017 11:30:19 AM

appropriateness of objects to discuss, then defines the object of study for analysis, that is the Denpasar District Court's Decision issued on 25 August 2014, after regular observation of the proceedings until the judge pass the decision. This analysis underlines that one of the main tasks of the courts is to resolve disputes in the case and put forward positive benefits to the parties. In the resolution of the dispute, the judge should reflect and regard a sense of justice and expediency in the decision. The decision imposed should ideally provide definite benefits rather than a negative impact on the society, in order that the decision made by the panel of honorable judges would be dignified and expedient. However, the Decision Number 25/Pdt.G/2014/PN.Dps has adversely affected the parties. In resolving case filed by the parties, Denpasar District Court in fact did not make up mind the issue, but only validates the reasons for legal actions. Thus, the decision issued does not solve the problem between the parties, but in fact restore the case to the condition prior to submission to the court.

(Fahmi Yanuar Siregar)

Keywords: freehold title, expediency, justice, legal certainty.

Jurnal isi.indd 16 1/6/2017 11:30:19 AM